



# **LAPORAN**

## **BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

### **TAHUN ANGGARAN 2023**



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

**Salam Sejahtera,**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat banyak perubahan kebijakan yang menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Salah satu fokus penguatan pemerintah adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK).

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT melalui Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan sejumlah kegiatan dalam mendukung semangat pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK. Penyusunan laporan bulanan ini menjadi bukti dokumentasi baik berupa data, angka dan narasi informasi kinerja pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh seluruh pengguna layanan LPSE di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, baik Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Penyedia.

Rekapitulasi aktivitas penginputan dan penayangan Rencana Umum Pengadaan, registrasi dan verifikasi penyedia, pendaftaran, penayangan dan transaksi pada Toko Daring dan e-Katalog disajikan dalam data dan informasi bulanan per Perangkat Daerah agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan dalam melakukan intervensi kebijakan yang tepat, baik yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa, maupun sektor-sektor lainnya yang saling beririsan dengan pengadaan pemerintah, utamanya di sektor pembangunan, pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Semoga laporan ini tidak saja merekam seluruh data/informasi yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pengadaan barang/jasa, namun dapat berguna bagi pengambilan kebijakan di sektor-sektor publik lainnya.

Sekian dan Terima Kasih.

**Kupang, Januari 2024**

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
I.    PENDAHULUAN.....	4
II.   DASAR HUKUM .....	5
III.  MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
IV.   PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
IV.1 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Penyedia.....	7
IV.2 Pelaksanaan RUP .....	8
IV.3 Perkembangan Data Realisasi Tender dan Non Tender.....	10
IV.4 Perkembangan E-Purchasing .....	11
4.4.1 Perkembangan Toko Daring.....	11
4.4.2 Perkembangan E-Katalog .....	12
IV.5 Perkembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKK ..	14
V.    PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	14
VI.   SOLUSI .....	15
VII.  PENUTUP .....	16
Lampiran 1    Paket Tender	
Lampiran 2    Paket Non Tender	
Lampiran 3    Realisasi Metode E-Purchasing	
Lampiran 4    Realisasi Katalog Elektronik	
Lampiran 5    Realisasi Toko Daring	

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa salah satu fungsi UKPBJ adalah pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Lebih jauh LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Provinsi NTT merupakan salah satu LPSE berbentuk *system provider* yang bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, di antaranya meliputi pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Beberapa fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan LPSE sepanjang tahun 2023 adalah layanan pendaftaran dan verifikasi pengguna LPSE, baik PA/KPA, PPK, POKJA Pemilihan dan Pejabat Pengadaan serta Penyedia, layanan pendaftaran SIKAP dan e-catalog bagi Penyedia UMKK dan Penyedia Menengah dan Besar, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi terhadap penginputan dan penayangan Rencana Umum Pengadaan dan Revisi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah dan UMKK yang melakukan onboarding produk dan transaksi secara e-purchasing melalui Toko Daring dan e-Katalog, baik e-catalog nasional, sektoral dan lokal.

Dalam melakukan tugas dan fungsi pengelolaan LPSE Provinsi NTT, telah ditetapkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 26/KEP/HK/2023 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Secara Elektronik Provinsi NTT Tahun 2023. Tim LPSE Provinsi NTT diketuai oleh Kabag Pengelolaan LPSE yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dan seorang Pembina yaitu Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Selanjutnya struktur LPSE Provinsi NTT memiliki 1 orang Sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh Kasubag Pembinaan SDM pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seorang koordinator helpdesk, dan 2 orang petugas helpdesk, 2 orang petugas verifikator, 1 orang admin agency, 1 orang admin sistem, 1 orang admin PPE, 1 orang trainer dan 6 orang tenaga administrasi.

Dengan jumlah ketua, sekretaris dan personil LPSE lainnya sebanyak 16 orang, LPSE Provinsi NTT dapat melakukan pelayanan secara efisien dan efektif,

yang dilakukan setiap jam dan hari kerja, termasuk diluar jam kerja dengan perjanjian dan kesepakatan antara pengguna dan pengelola LPSE. Sedangkan pengelolaan sistem LPSE, layanan yang diberikan adalah setiap hari kalender selama 24 jam non stop mengingat layanan pemeliharaan server dan penyediaan internet harus diberikan 24 jam non stop agar proses tender, non tender melalui e-purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung dapat berjalan dengan lancar, kecuali terdapat keadaan force majeure diluar kendali pengelola LPSE, seperti server *down* akibat listrik mati, atau akibat bencana alam, atau migrasi dan maintenance sistem yang dilakukan secara terpusat oleh LKPP.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Provinsi NTT melalui LPSE Provinsi NTT memiliki peran yang sangat strategis dalam bekerja bersama secara kolaboratif dengan sejumlah instansi terkait, baik Pemerintah Pusat melalui LKPP dan KPK dan di Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Instansi Vertikal baik BPK, BPKP serta Lembaga Perbankan seperti Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT dan Bank NTT. Semuanya bekerja secara kolaboratif dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mendorong penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM pada e-catalog lokal dan toko daring serta mendukung UMKK go digital, inklusif dan pengadaan pemerintah yang *cashless*, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.027/33/BPBJ/2022 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi NTT Tahun 2023;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui e-Purchasing;
9. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
10. Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.020/08/BPBJ/2023 tentang Target dan Pedoman Belanja Barang/Jasa Melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Daring) Provinsi NTT Tahun 2023.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan laporan bulanan monitoring dan evaluasi pengelolaan LPSE Provinsi NTT adalah agar dapat memberikan data dukung kepada para pengambil keputusan dan kebijakan (*evidence based policy*) dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan di sektor pengadaan barang/jasa. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini antara lain:

1. Merekapitulasi dan melaporkan data RUP dan Revisi RUP bulanan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Menyajikan dan melaporkan data E-Purchasing tahunan baik melalui Toko Daring dan E-Katalog Lokal di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
3. Merekapitulasi layanan pendaftaran dan verifikasi Penyedia dan Pengguna LPSE lainnya;

4. Menyajikan dan melaporkan data penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT;
5. Melakukan evaluasi terhadap data pengadaan tender dan non tender sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

#### IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

##### IV.1 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Penyedia

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), UKPBJ / Pokja Pemilihan (Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga melayani registrasi Penyedia barang dan jasa, serta melayani pembuatan Akun Auditor dan pendampingan dalam menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa.

	Registrasi	Reset Password	Konsultasi	Lainnya	Jumlah Penyedia
Januari	8	3	6	3	20
Februari	8	4	27	5	44
Maret	24	3	26	7	60
April	7	2	10	5	24
Mei	8	7	20	6	41
Juni	14	3	22	6	45
Juli	14	4	16	6	40
Agustus	9	1	10	9	29
September	9	4	12	3	28
Oktober	6	3	9	2	20
November	9	6	9	1	25
Desember	9	0	7	4	20
<b>TOTAL (TAHUN 2023)</b>	<b>125</b>	<b>40</b>	<b>174</b>	<b>57</b>	<b>396</b>

Untuk Pembuatan Akun dan *Reset* Akun PPK dan Pejabat Pengadaan, sebanyak **97** (sembilan puluh tujuh) akun PPK dan **75** (tujuh puluh lima) akun Pejabat Pengadaan telah dikerjakan.

## IV.2 Pelaksanaan RUP

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) adalah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

Pengadaan Barang/Jasa yang baik tentu saja harus didukung oleh perencanaan pengadaan yang baik pula. Penyusunan RUP merupakan salah satu tahapan awal dari proses perencanaan pengadaan. Penyusunan RUP dilakukan oleh PPK, atau dapat dilegasikan satu tingkat kebawah, yakni staf yang bertindak sebagai Admin RUP dalam mengentri draft RUP pada aplikasi SIRUP.

Pada TA. 2023 semua Perangkat Daerah telah menginput Penyedia pada Aplikasi SIRUP. Berikut ini 5 (lima) Perangkat Daerah dengan nilai Penyedia terbesar pada TA. 2023:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	724	291.438.954.007
2	RSU WZ. Yohanes	83	260.295.317.919
3	Dinas PUPR	197	152.045.787.291
4	Dinas ESDM	222	88.626.127.184
5	Sekretariat DPRD	111	44.043.090.330

Sedangkan untuk Swakelola, semua Perangkat Daerah juga sudah menginput pada Aplikasi SIRUP. Berikut 5 (lima) Perangkat daerah dengan nilai Swakelola paling besar pada TA. 2023 pada tabel dibawah ini

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	183	1.538.165.395.936
2	Badan Keuangan Daerah	70	944.178.284.287
3	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	46	190.970.934.358
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	183.453.806.360
5	Sekretariat DPRD	33	111.186.240.554

Berikut data paket Pengadaan Langsung untuk Tahun Anggaran 2023 dengan 5 (lima) Perangkat Daerah dengan nilai Pengadaan Langsung terbesar sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	418	45.486.719.653
2	Sekretariat DPRD	55	11.475.173.930
3	Biro Umum	21	7.919.728.600
4	Dinas PUPR	118	7.692.784.979
5	Badan PENDA	486	5.721.599.82

Untuk Paket Tender/Seleksi, terdapat 12 Perangkat Daerah yang memiliki Paket Tender/Seleksi. Berikut 5 (lima) Perangkat Daerah dengan nilai Tender terbesar pada TA. 2023 sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	84	94.793.400.000
2	Dinas Kelautan & Perikanan	9	27.113.100.000
3	Dinas PUPR	23	18.606.236.000
4	Dinas Peternakan	8	15.094.837.150
5	RSU W.Z Yohannes	5	13.904.837.150

Untuk *E-Purchasing* , hampir semua Perangkat Daerah sudah menginput dan masih terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah yang belum menginput. Berikut ini 5 (lima) Perangkat Daerah yang memiliki nilai *e-purchasing* terbesar sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	218	150.694.079.354
2	Dinas PUPR	46	124.148.459.312
3	Dinas ESDM	12	83.918.500.000
4	RSU WZ. Yohannes	32	62.038.409.522
5	Sekretariat DPRD	56	32.567.916.400

### IV.3 Perkembangan Data Realisasi Tender dan Non-Tender

Pada TA. 2023, terdapat 10 (**sepuluh**) Perangkat Daerah memproses paket Tender yang bersumber dari dana APBD dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 164.882.552.600,- dan realisasinya sebanyak Rp. 151.696.364.39, - dengan perincian sebagaimana **Lampiran 2**. Berikut ini 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan Realisasi Tender terbesar, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang paling tinggi nilai Paket Tender APBD dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **57 (lima puluh tujuh)** Paket Tender dengan nilai pagu sebesar Rp 93.292.520.000,- dan realisasinya Rp 85.050.262.123,-;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **7 (tujuh)** Paket Tender dengan nilai pagu sebesar Rp 27.113.100.000,- dan realisasinya Rp 26.1129.178.380,-
3. RSUD WZ. Yohannes dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **4 (empat)** Paket Tender dengan nilai pagu sebesar Rp 13.449.256.850,- dan realisasinya Rp 12.233.557.686,-

Sedangkan untuk kegiatan Non Tender yang bersumber dari APBD, baru terdapat 16 (enam belas) Perangkat Daerah yang melakukan proses non tender. Berikut ini 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan Realisasi Non Tender terbesar, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **114 (seratus empat belas)** Paket Non Tender dengan nilai pagu Rp 13.009.997.750,- dan realisasinya Rp 12.537.310.994,-;
2. Dinas PUPR dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **29 (dua puluh sembilan)** Paket Non Tender dengan nilai pagu Rp 4.243.102.800,- dan realisasinya Rp 4.004.072.379,-
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Jumlah Paket selesai sebanyak **24 (dua puluh empat)** Paket Non Tender dengan nilai pagu Rp 4.005.600.000,- dan realisasinya Rp 3.509.689.600,-

Untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, terdapat **1 (satu)** Paket Tender yang diproses oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki **6 (enam)** Tender dengan nilai pagu Rp 440.000.000,- dan jumlah realisasinya Rp 425.502.000,- dengan Efisiensi Tender Rp 14.498.000,- .

Terdapat **2 (dua)** Perangkat Daerah yang memproses Paket Non Tender yang bersumber dari APBN yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan jumlah **40 (empat puluh)** Paket Non Tender dengan nilai pagu sebesar Rp 6.827.000.000,- dan jumlah realisasinya sebesar Rp 6.362.711.407,- dengan Efisiensi Tender sebesar Rp 35.658.592,- .
2. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jumlah **2 (dua)** Paket Non Tender dengan nilai pagu sebesar Rp 200.000.000,- dan jumlah realisasinya sebesar Rp 199.800.000,- dengan Efisiensi Tender sebesar Rp 200.000,-

#### **IV.4 Perkembangan E-Purchasing**

##### **IV.4.1 Perkembangan Toko Daring**

- a) Realisasi Toko Daring Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 5.392.974.146,-** dengan perincian sebagaimana **Lampiran 5**.
- b) Terdapat **38 (tiga puluh delapan)** Perangkat Daerah yang bertransaksi melalui Toko Daring pada Tahun Anggaran 2023. **1 (satu)** Perangkat Daerah yang belum melakukan adalah **Dinas Kelautan dan Perikanan**. **5 (lima)** Perangkat Daerah dengan total nilai transaksi terbesar adalah sebagai berikut:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 1.799.308.720,-**
  2. Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 539.947.700,-**
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 489.203.406,-**
  4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 370.103.350,-**
  5. Biro Umum Sekretariat Daerah dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 358.332.903,-**

- c) Nilai Transaksi, Jumlah Transaksi, Jumlah Pengguna, Jumlah Penyedia, dan Jumlah Produk Tayang pada TA.2023 sebagai berikut:

No.	Ringkasan	2023
1	Nilai Transaksi	Rp. 5.392.974.146,-
2	Jumlah Transaksi	1002
3	Jumlah Pengguna	94
4	Jumlah Penyedia	171
5	Jumlah Produk Tayang	6.326

#### IV.4.2 Perkembangan E-Catalog

- a) Sampai dengan saat ini, terdapat kurang lebih **29 (dua puluh sembilan) etalase** Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi NTT, yaitu:
1. Alat Tulis Kantor
  2. Alat/Mesin Pertanian
  3. Aspal
  4. Bahan Material
  5. Bahan Pokok
  6. Belanja Media
  7. Benih Holtikultura
  8. Benih Tanaman Pangan
  9. Benih Tanaman Perkebunan
  10. Beton Precast
  11. Beton Ready Mix
  12. Event Organizer
  13. Hewan Ternak
  14. Jasa Cleaning Service
  15. Jasa Keamanan
  16. Jasa Kebersihan
  17. Jasa Pengelolaan Sampah
  18. Makanan dan Minuman
  19. Meubelair/Furniture
  20. Pakaian Dinas dan Kain Tradisional

21. Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang
22. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
23. Pemeliharaan Bangunan Gedung
24. Pemeliharaan Rutin Jalan
25. Perhotelan
26. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
27. Seragam Sekolah
28. Service Kendaraan
29. Souvenir

b) Realisasi Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 415.343.233.995,-** .

Jenis Katalog	Realisasi (Rp.)	Jumlah OPD
Nasional	119.547.359.450	9
Sektoral	156.096.566.954	7
Lokal	140.699.307.591	13
<b>Jumlah</b>	<b>415.343.233.995</b>	<b>18 OPD Implementasi</b>

c) Terdapat **18 (delapan belas)** Perangkat Daerah yang sudah implementasi belanja barang/jasa menggunakan metode Katalog Elektronik dan **21 (dua puluh satu)** Perangkat Daerah BELUM implementasi. Berikut ini **5 (lima)** Perangkat Daerah dengan implementasi Katalog Elektronik terbanyak yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 122.211.582.431,-**
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 117.454.109.620,-**
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nilai transaksi sebesar **Rp. 83.229.259.000,-**
- RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 53.579.143.461,-**
- Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total nilai transaksi sebesar **Rp. 12.710.067.631,-**

- d) Etalase Katalog Elektronik Lokal yang diusulkan oleh UKPBJ NTT antara lain:
- Etalase Perhotelan;
  - Etalase Meubelair / Furniture;
  - Etalase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - Etalase Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- e) Rincian realisasi Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4**.

#### IV.5 Perkembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKK

Berikut ini grafik data perkembangan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKK pada Tahun Anggaran 2023:



Data : Bigbox LKPP <https://lkpp.bigbox.co.id/>

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran) masih melakukan proses pengadaan barang/jasa. Praktek ini tidak sesuai dengan ketentuan PBJ dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Aplikasi e-purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Daring) belum seluruhnya mengakomodir jenis/item belanja Perangkat Daerah.

3. Pengelola PBJ Perangkat Daerah masih melakukan transaksi manual (SPJ – Kuitansi Manual).
4. Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK pada Perangkat Daerah; dan
5. Terbatasnya anggaran PBJ kegiatan rutin sebagai akibat terbatas/terseleksi pengajuan anggaran oleh Badan Keuangan Daerah.
6. Perubahan atau penambahan fitur-fitur baru pada SPSE yang menghambat atau memerlukan penyesuaian Pelaku PBJ.

## **VI. SOLUSI**

Keberadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai perwujudan konsep e-procurement yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat turut memantau dan bahkan menjadi bagian yang memberi dukungan bahkan kontribusi di setiap program pembangunan daerah ini. Memperhatikan rendahnya kinerja PBJ metode E-purchasing Tahun Anggaran 2023, maka disampaikan saran/solusi tindak lanjut di Tahun Anggaran 2024 oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (LPSE) dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi :

1. Materi e-purchasing menjadi sub unsur pendukung Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Biro PBJ SETDA Provinsi NTT melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan supervisi/pengawasan secara berkala belanja barang/jasa menggunakan metode e-purchasing.
3. Memberikan sertifikat penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah mencapai target dan surat teguran bagi Perangkat Daerah yang belum mencapai target.
4. Mengumumkan secara berkala progress/perkembangan belanja barang/jasa (e-purchasing) secara berkala – triwulan tahun berjalan.
5. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejumlah Perangkat Daerah seperti Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk dapat bersinergi dalam mendorong UMKK untuk menayangkan produk pada Toko Daring dan Katalog Elektronik.
6. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK.

## VII. PENUTUP

Demikian laporan Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan bagi para pengambil kebijakan dalam perbaikan pengadaan barang/jasa dan para pemangku kepentingan dalam mengikuti perkembangan pengadaan barang/jasa di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dibuat di Kupang  
Pada Januari 2024  
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik,



Drs. Bambang A. Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710615 199101 1 002

PARAF HIERARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	

Lampiran 1. Paket Tender

PERKEMBANGAN PAKET STRATEGIS APBD

Keadaan : 31 Desember 2023

No.	Perangkat Daerah	Perkembangan Paket Tender					Nilai Paket (Rp.)		Efisiensi Tender (Rp.)
		Jumlah Paket	Sisa Paket	Jumlah Tender	Selesai	Dalam Proses	Pagu Tender	Realisasi Tender	
1	Dinas Peternakan	8	7	1	1	0	210.573.900	209.995.854	578.046
2	Dinas Pekerjaan Umum	22	2	20	20	0	12.721.406.000	11.576.128.524	1.145.277.476
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80	23	57	57	0	93.292.520.000	85.050.262.123	8.242.257.877
4	Dinas ESDM	10	2	8	8	0	2.573.870.000	2.516.004.172	57.865.828
5	Dinas Perhubungan	3	1	2	2	0	5.241.870.000	4.728.757.339	513.112.649
6	RSU WZ. Yohannes	5	1	4	4	0	13.449.256.850	12.233.557.686	1.215.699.164
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21	11	10	10	0	9.425.541.850	8.506.400.113	643.577.401
8	Dinas Kelautan dan Perikanan			7	7	0	27.113.100.000	26.129.178.380	983.921.620
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			1	1	0	290.914.000	230.880.000	60.034.000
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			1	1	0	563.500.000	515.200.790	48.299.210
<b>JUMLAH</b>		<b>149</b>	<b>47</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>164.882.552.600</b>	<b>151.696.364.981</b>	<b>12.910.623.271</b>

PAKET STRATEGIS APBN

No.	Perangkat Daerah	Perkembangan Paket Tender					Nilai Paket (Rp.)		Efisiensi Tender (Rp.)
		Jumlah Paket	Sisa Paket	Jumlah Tender	Selesai	Dalam Proses	PAGU DIPA	Realisasi Tender	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	0	6	6	0	440.000.000	425.502.000	14.498.000
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>440.000.000</b>	<b>425.502.000</b>	<b>14.498.000</b>

REKAPITULASI PAKET STRATEGIS APBD & APBN

Rekapitulasi Tender		Jumlah Paket	Sisa Paket	Proses Tender	Selesai	Dalam Proses	Pagu Tender	Realisasi Tender	Efisiensi Tender (Rp.)
1	APBD	149		111	111	0	164.882.552.600	151.696.364.981	12.910.623.271
2	APBN	6		6	6	0	440.000.000	425.502.000	14.498.000
<b>Jumlah</b>		<b>155</b>		<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>165.322.552.600</b>	<b>152.121.866.981</b>	<b>12.925.121.271</b>

Kupang, Januari 2024

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Drs. Bambang Ardi Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I - IV b  
NIP 197106151991011002

PARAF HIRARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PELAKSANA	

## PERKEMBANGAN PAKET NON STRATEGIS APBD (PL)

Keadaan : 31 Desember 2023

No.	Perangkat Daerah	Perkembangan Paket Tender				Nilai Paket (Rp.)		Efisiensi Tender
		Jumlah Paket RUP	Proses SPSE	Selesai	Dalam Proses	Pagu Non Tender	Realisasi Non Tender (PL)	
1	Dinas Pertanian & KP		24	24	0	4.005.600.000,00	3.509.689.600,00	495.910.400,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	1	0	53.050.000,00	52.985.000,00	65.000,00
3	Biro PBJ		1	1	0	77.300.000,00	76.000.000,00	1.300.000,00
4	Dinas PUPR		30	29	1	4.243.102.800,00	4.004.072.379,85	239.030.420,15
5	Dinas Peternakan		2	2	0	318.411.269,00	317.237.135,20	1.174.133,80
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		114	114	0	13.009.997.750,00	12.537.310.994,53	472.686.755,47
7	Dinas Kelautan dan Perikanan		19	19	0	2.039.990.000,00	2.022.512.780,00	17.477.220,00
8	Dinas LHK		9	9	0	1.623.852.050,00	1.579.918.000,00	43.934.050,00
9	Dinas Sosial		11	9	2	1.490.977.800,00	1.217.704.935,00	273.272.865,00
10	Dinas ESDM		12	12	0	1.313.614.400,00	1.312.054.668,75	1.559.731,25
11	Badan Penghubung		1	1	0	149.917.000,00	149.914.162,44	2.837,56
12	Biro Umum		2	2	0	300.000.000,00	278.233.987,50	21.766.012,50
13	Sekretariat DPRD		4	4	0	796.386.500,00	770.406.877,50	25.979.622,50
14	Dinas Perhubungan		4	4	0	307.787.950,00	297.815.099,41	9.972.850,59
15	BAPENDA		1	1	0	56.032.000,00	56.030.253,66	1.746,34
16	RSU. WZ Yohannes		1	0	1	377.099.356,00	-	377.099.356,00
JUMLAH		0	236	232	4	30.163.118.875,00	28.181.885.873,84	1.981.233.001,16

## PAKET NON STRATEGIS APBN (PL)

No.	Perangkat Daerah	Perkembangan Paket Tender				Nilai Paket (Rp.)		Efisiensi Tender
		Jumlah Paket	Realisasi	Selesai	Dalam Proses	PAGU DIPA	Realisasi Non Tender (PL)	
1	Dinas Pertanian dan KP	40	40	40	0	6.827.000.000,00	6.362.711.407,20	35.638.592,80
2	Dinas Kelautan & Perikanan	2	2	2	0	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00
JUMLAH		42	42	42	0	7.027.000.000,00	6.562.511.407,20	35.638.592,80

Rekapitulasi Tender		Jumlah Paket	Proses Tender	Selesai	Dalam Proses	Pagu Tender	Realisasi Tender	Efisiensi Tender (Rp.)
1	APBD	0	236	232	4	30.163.118.875,00	28.181.885.873,84	1.981.233.001,16
2	APBN	42	42	42	0	7.027.000.000,00	6.562.511.407,20	35.638.592,80
Jumlah		42	278	274	4	37.190.118.875,00	34.744.397.281,04	2.016.871.593,96

Kupang, Januari 2024

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Drs. Bambang Ardi Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I - IV b  
NIP 197106151991011002

PARAF HIRARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PELAKSANA	

## Lampiran 3

REALISASI METODE **e-PURCHASING**  
BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH TA. 2023

Keadaan : 31 Desember 2023

No.	Perangkat Daerah	PAGU Barang/Jasa e-Purchasing	Realisasi e-Purchasing			Prosentase (6/3 x 100%)	Keterangan
			e-Katalog	Toko Daring	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Kepegawaian Daerah	1.248.386.420	254.165.000	135.997.352	390.162.352	31,25	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	950.165.350	210.000.000	7.363.000	217.363.000	22,88	
3	Badan Keuangan Daerah	5.111.997.191	750.000.000	216.656.828	966.656.828	18,91	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.997.999.040	-	489.203.406	489.203.406	16,32	
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	6.737.498.207	1.662.823.928	84.280.000	1.747.103.928	25,93	
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	241.545.486	-	23.400.000	23.400.000	9,69	
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.263.086.256	3.363.051.150	370.103.350	3.733.154.500	22,95	
8	Badan Penghubung	3.621.133.350	-	2.420.550	2.420.550	0,07	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.749.743.916	-	199.900.000	199.900.000	7,27	
10	Biro Administrasi Pimpinan	372.662.100	-	117.817.192	117.817.192	31,62	
11	Biro Hukum	386.877.600	-	6.636.000	6.636.000	1,715	
12	Biro Organisasi	281.919.579	-	102.824.000	102.824.000	36,47	
13	Biro Pemerintahan	586.340.980	-	34.588.176	34.588.176	5,90	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	931.718.260	511.750.000	89.404.100	601.154.100	64,52	
15	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	339.701.340	-	33.866.200	33.866.200	9,97	
16	Biro Umum	8.019.610.000	1.999.640.000	358.332.903	2.357.972.903	29,40	
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	86.578.627.184	83.229.259.000	11.207.449	83.240.466.449	96,14	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.353.284.839	-	27.291.689	27.291.689	2,02	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.883.952.500	-	-	-	-	Tidak Implementasi
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.612.850.300	543.400.000	261.450	543.661.450	20,81	
21	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.401.833.951	12.710.067.631	539.947.700	13.250.015.331	76,14	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.198.508.155	4.800.000.000	38.850.000	4.838.850.000	93,08	
23	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.025.715.884	-	196.875	196.875	0,005	
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.027.492.002	4.014.200	74.396.053	78.410.253	0,30	

No.	Perangkat Daerah	PAGU Barang/Jasa e-Purchasing	Realisasi e-Purchasing			Prosentase (6/3 x 100%)	Keterangan
			e-Katalog	Toko Daring	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.711.350.960	-	4.014.865	4.014.865	0,15	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	133.439.551.291	122.211.582.431	196.629.100	122.408.211.531	91,73	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.042.543.720	-	8.573.392	8.573.392	0,82	
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.618.893.916	14.040.000	105.512.800	119.552.800	7,38	
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.171.516.728	-	69.650.410	69.650.410	5,95	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	566.278.249.981	117.464.109.620	1.799.308.720	119.263.418.340	21,06	
31	Dinas Perhubungan	3.117.715.184	-	19.409.700	19.409.700	0,62	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.673.491.568	-	48.920.500	48.920.500	1,33	
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.742.403.741	10.184.187.574	27.486.798	10.211.674.372	49,23	
34	Dinas Peternakan	5.180.159.248	1.852.000.000	8.443.039	1.860.443.039	35,91	
35	Dinas Sosial	2.897.011.860	-	17.012.000	17.012.000	0,59	
36	Inspektorat Daerah	1.756.265.140	-	33.172.876	33.172.876	1,89	
37	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	62.081.734.522	53.579.143.461	1.135.135	53.580.278.596	86,31	
38	Satuan Polisi Pamong Praja	1.640.340.100	-	5.135.540	5.135.540	0,313	
39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.043.090.330	-	83.625.000	83.625.000	0,19	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.050.316.968.179</b>	<b>415.343.233.995</b>	<b>5.392.974.146</b>	<b>420.736.208.141</b>	<b>40,06</b>	

Kupang, Januari 2024

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Drs. Bambang Ardi Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I - IV b  
NIP 197106151991011002

PARAF HIRARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PELAKSANA	

## Lampiran 4

REALISASI **KATALOG ELEKTRONIK**  
BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH TAHUN AANGGARAN 2023

Keadaan : 31 Desember 2023

No.	Perangkat Daerah	Realisasi Katalog Elektronik				Keterangan
		Katalog Nasional	Katalog Sektoral	Katalog Lokal	Jumlah	
1	Badan Kepegawaian Daerah	198.000.000	-	56.165.000	254.165.000	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	210.000.000	-	210.000.000	
3	Badan Keuangan Daerah	750.000.000	-	-	750.000.000	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	Tidak Implementasi
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.230.884.600	-	431.939.328	1.662.823.928	
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-	Tidak Implementasi
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	3.363.051.150	3.363.051.150	
8	Badan Penghubung	-	-	-	-	Tidak Implementasi
9	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	Tidak Implementasi
10	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
11	Biro Hukum	-	-	-	-	Tidak Implementasi
12	Biro Organisasi	-	-	-	-	Tidak Implementasi
13	Biro Pemerintahan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	511.750.000	-	-	511.750.000	
15	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
16	Biro Umum	-	-	1.999.640.000	1.999.640.000	
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	83.229.259.000	-	83.229.259.000	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	543.400.000	543.400.000	
21	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	11.140.353.631	1.569.714.000	12.710.067.631	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.800.000.000	-	-	4.800.000.000	
23	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	Tidak Implementasi
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	4.014.200	4.014.200	
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	Tidak Implementasi

No.	Perangkat Daerah	Realisasi Katalog Elektronik				Keterangan
		Katalog Nasional	Katalog Sektoral	Katalog Lokal	Jumlah	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	531.523.000	1.100.000.000	120.580.059.431	122.211.582.431	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	Tidak Implementasi
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	14.040.000	14.040.000	
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	Tidak Implementasi
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.400.198.850	6.656.111.038	4.407.799.732	117.464.109.620	
31	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	Tidak Implementasi
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.918.225.000	4.183.518.824	3.082.443.750	10.184.187.574	
34	Dinas Peternakan	-	-	1.852.000.000	1.852.000.000	
35	Dinas Sosial	-	-	-	-	Tidak Implementasi
36	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	Tidak Implementasi
37	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	2.206.778.000	48.577.324.461	2.795.041.000	53.579.143.461	
38	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	Tidak Implementasi
39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	Tidak Implementasi
<b>JUMLAH</b>		<b>119.547.359.450</b>	<b>155.096.566.954</b>	<b>140.699.307.591</b>	<b>415.343.233.995</b>	

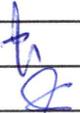
Sumber : <http://redas-e-katalog.lkpp.go.id/>

Kupang, Januari 2024

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Drs. Bambang Ardi Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I - IV b  
NIP 197106151991011002

PARAF HIRARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PELAKSANA	

## Lampiran 5

**REALISASI e-PURCHASING METODE TOKO DARING**  
**BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Keadaan : 31 Desember 2023

No.	Perangkat Daerah	Tahun Realisasi (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2022	31 Desember 2023	
1	Badan Kepegawaian Daerah	22.884.545	135.997.352	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.024.000	7.363.000	
3	Badan Keuangan Daerah	390.769.090	216.656.828	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.199.539	489.203.406	
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.272.725	84.280.000	
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	23.400.000	
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.614.566.110	370.103.350	
8	Badan Penghubung	-	2.420.550	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	101.856.000	199.900.000	
10	Biro Administrasi Pimpinan	7.115.534	117.817.192	
11	Biro Hukum	3.763.059	6.636.000	
12	Biro Organisasi	2.387.000	102.824.000	
13	Biro Pemerintahan	2.369.684	34.588.176	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94.482.714	89.404.100	
15	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10.984.100	33.866.200	
16	Biro Umum	46.861.079	358.332.903	
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	6.316.236	11.207.449	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	271.960	27.291.689	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	Tidak Implementasi
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.004.414	261.450	
21	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.483.205.908	539.947.700	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	225.801.350	38.850.000	
23	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.328.823	196.875	
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.764.972	74.396.053	
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.336.363	4.014.865	

No.	Perangkat Daerah	Tahun Realisasi (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2022	31 Desember 2023	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	135.125.930	196.629.100	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.072.101	8.573.392	
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.193.182	105.512.800	
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.005.000	69.650.410	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.017.353	1.799.308.720	
31	Dinas Perhubungan	3.509.455	19.409.700	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	347.346.409	48.920.500	
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	193.396.088	27.486.798	
34	Dinas Peternakan	4.323.353	8.443.039	
35	Dinas Sosial	790.538	17.012.000	
36	Inspektorat Daerah	5.684.000	33.172.876	
37	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	101.995.145	1.135.135	
38	Satuan Polisi Pamong Praja	1.231.529	5.135.540	
39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	83.625.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>7.890.255.288</b>	<b>5.392.974.146</b>	

Sumber : laporan bulanan

Kupang, Januari 2024

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Drs. Bambang Ardi Sage, M.Si  
Pembina Tingkat I - IV b  
NIP 197106151991011002

PARAF HIRARKI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
PELAKSANA	